

Marjinalitas Sebagai Fiksi

Oleh: Ariel Heryanto

Dunia sastra adalah dunia fiksi, dunia seolah-olah. Kehidupan sosial di Indonesia kaya akan realitas seolah-olah. Maka layaklah jika dipertanyakan apakah kehidupan sosial di Indonesia merupakan lahan yang sangat subur bagi kehidupan sastra. Bahkan mungkin kehidupan sosial Indonesia itu sendiri adalah limpahan khasanah teks sastra, sastra yang hidup.

Anehnya, sampai sekarang banyak orang mendapat kesan bahwa kondisi kesusasteraan Indonesia tidak terlalu menggembirakan. Yang menjadi primadona dalam masyarakat adalah proyek pertumbuhan ekonomi, serta pembinaan stabilitas politik dan keamanan. Belakangan teknologi ikut menempati posisi sentral. Sementara kesusasteraan tetap berkubang pada posisi marjinal. Dengan demikian nasib kesusasteraan ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi, bagai itik mati kehausan di tengah kolam. Bagaimana gambaran yang seolah-oleh bertolak belakang itu dapat dipahami?

Fiksi Di mana-mana

Dalam sebuah acara halal bihalal yang diadakan Forum Demokrasi di Taman Ismail Marzuki bulan Mei 1991, Abdurahman Wahid menyampaikan sebuah karya tertulis tentang "Demokrasi yang Seolah-olah" di negeri ini:

Seolah-olah hukum sudah tegak, seolah-olah sistem demokrasi sudah berlaku, seolah-olah tindakan penguasa selalu konstitusional, seolah-olah ada kebebasan, dan sebagainya (lihat TEMPO, 1991)

Tentu saja pernyataan semacam itu bukan yang pertama. Yang disampaikan Abdurahman Wahid juga bukan sebuah kritik seni, walau dinyatakan di salah satu pusat pagelaran karya-karya seni.

Jauh sebelumnya orang sering mengejek anggota parlemen dengan mengatakan bahwa grup kesenian teater Srimulat gulung tikar karena kalah bersaing dengan apa yang terjadi di sidang parlemen. Dalam salah satu karyanya yang tenar, Iwan Fals bernyanyi tentang para "Badut" di koran-koran, di televisi, dan di berbagai tempat lain. Pada awal dekade itu, reputasi lembaga pengadilan diejek habis-habisan oleh berbagai pihak. Media massa cetak melaporkan gejala ini besar-besaran dengan berbagai ilustrasi topeng yang

biasa dijadikan ikon untuk dunia teater. Berlangsungnya sidang pengadilan terhadap 21 mahasiswa demonstran dari berbagai kota pada tahun 1994 dilaporkan oleh pers sebagai "Panggung Peradilan Twenty One" (FORUM Keadilan, 1994), sebuah plesetan untuk nama jaringan kompleks perbioskupan yang punya cabang di berbagai kota besar di Indonesia.

Contoh-contoh seperti itu dapat dibuat jauh lebih panjang, tetapi itu tidak perlu. Yang lebih perlu adalah mencermati implikasi beberapa kasus itu. Pertama, yang tampil sebagai 'pengarang dalam berbagai pernyataan di atas bukannya sastrawan, kritikus atau sarjana kesusasteraan. Mereka mempunyai berbagai latar belakang dan berbagai bidang profesi. Mereka peka terhadap seluk-beluk sastra, tetapi mereka bukan orang yang secara khusus menekuni kesusasteraan. Mungkin karena ini pula, dalam berbagai ungkapan di atas fiksi merupakan sebuah stigma, paling sedikit sebuah ejekan. Mirip, walau tidak seseram PKI atau OTB. Bagi para 'pengarang' di atas, realitas sosial menjadi murahan, palsu, dan 'hanya seolah-olah' apabila berkualitas atau bercorak fiktif.

Karena itu ada baiknya kita perhatikan kesaksian-kesaksian dari pengarang dan sekaligus pengamat sosial yang lain, yakni mereka yang tidak menganggap realitas fiktif lebih rendah daripada realita faktual. Berikut ini sebuah kasus dari masa kampanye Pemilu 1992. Seperti di berbagai kota lain, masa kampanye di Yogyakarta pada tahun itu dimeriahkan oleh akrobatik konvoi sepeda motor anak-anak muda dengan suara knalpot terbuka yang meraung-raung. Pada suatu kali ('kebetulan?') pada waktu PDI mendapat giliran kampanye, pemerintah setempat mengeluarkan larangan konvoi semacam itu.

Apa reaksi massa? Yang marah ada, dan itu wajar. Tetapi yang lebih memukau adalah tindakan sebagian anak muda yang "ganti mengendarai becak (berkeliling kota) sambil membunyikan rekaman suara knalpot sepeda motor!" Itulah kemeriahan 'seakan-akan suara knalpot' dalam acara yang 'seakan-akan Pemilu'. Para juru kampanye seakan-akan mengobral janji muluk-muluk kepada massa jelata. Massa ini juga bertingkah seakan-akan berharap janji-janji itu akan dipenuhi. Seakan-akan acara Pemilu itu merupakan sebuah pertarungan antar partai politik untuk mewakili suara rakyat yang berdaulat. Semua terlibat sebagai

pengarang kolektif dalam proses kreatif penciptaan sebuah narasi tentang demokrasi Indonesia.²

Tidak seseram PKI dan OTB? Kedua mahluk ini pun bisa seram, sekaligus seakan-akan seram di negeri yang kaya fiksi. Inilah pengakuan salah seorang yang paling berwenang bicara tentang bahaya subversif di negeri Orde Baru, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijensi (BAKIN):

Hal lucu dunia intel adalah kalau bicara teknik psywar. Sebagai intel kita mengarang isu, yang kemudian kita lemparkan entah di pers cetak, radio, atau televisi. Kita bikin seolah-olah cerita itu beneran. Biasanya setelah dilemparkan, orang akan membahas dan cenderung menambah-nambah. Akhirnya isu tadi kan kembali menjadi laporan. Nah lucunya dari laporan yang kembali itu kita sendiri jadi percaya bahwa itu beneran, hahaha. Bahkan ketakutan sendiri dan berpikir, "Jangan-jangan isu tadi memang bener, hahaha!"

(JAKARTA-JAKARTA, 1993)

Mereka yang menyandang gelar pengarang 'fiksi' tentu saja tidak *berniat* menganggap karya-karya mereka lebih rendah daripada karya-karya orang lain yang mengaku berupa paparan 'faktual'. Namun sebagian dari mereka yang dijuluki penulis 'fiksi', tak kurang-kurangnya yang merasa perlu menempelkan sebuah pengumuman semacam ini:



*semua pelaku dan tokoh serta kejadian dalam cerita ini tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sebenarnya...*³

Mengapa peringatan itu dirasa perlu? Tentu bukan karena pengarangnya *berniat* merendahkan-diri di hadapan pengarang dan pembaca karya-karya non-fiksi. Kalau pun ada, lebih dari satu alasan, salah satu yang kuat adalah untuk melindungi pengarangnya sendiri dan kemungkinan tindakan represif oleh pemerintah. Novel itu berkisah tentang berbagai krisis dalam pemerintahan Soekarno, dan ditulis di akhir masa pemerintahan itu. Dalam seluruh sejarahnya, Indonesia kaya dengan kasus pengadilan terhadap pengarang 'faktual', maupun 'fiksi' yang dianggap merongrong kekuasaan 'faktual'.

Praktek pemasangan peringatan 'ini fiksi, bukan faktual' di bagian awal narasi karya fiksi dapat dijumpai pada beberapa kasus lain. Mereka tidak menyerempet-nyerempet bahaya politik seperti contoh di atas. Tetapi mereka menyerempet-nyerempet bahaya dengan mengusik kekuasaan lain (moralitas, estetika, atau religius) yang tidak sepenuhnya berpusat pada birokrasi negara. Masalah keamanan tampaknya merupakan pertimbangan utama: bagaimana pengarang fiksi bersiasat mendapatkan legitimasi berkisah tentang realitas 'faktual' dan sekaligus terlindung dari resiko tindakan balas dendam oleh pihak yang bertanggung jawab atas realitas itu.

Yang penting untuk diteliti bukan hanya alasan para pengarang fiksi berbuat demikian, tetapi juga dalam konteks sosial apa alasan itu dirasa penting, dan apa implikasinya bagi publik. Dua implikasi paling mencolok adalah ini. Pertama, pernyataan-pernyataan itu mengimplikasikan bahwa di luar teks sastra *ada* realitas-realitas yang faktual. Karya fiksi mungkin ada kemiripannya, tumpang-tindihnya, atau kaitan-kaitan lain dengan realitas dan teks faktual, namun karya fiksi dan karya faktual dianggap *dapat dan seharusnya* dibedakan.

Dengan demikian, implikasi yang kedua yang lebih subtil, dan bertentangan dengan niat pengarangnya, pernyataan semacam itu pada akhirnya merendahkan derajat sosial karya-karya fiksi dibandingkan dengan karya faktual. Seakan-akan karya fiksi 'terpaksa' ditulis karena/selama ada keadaan darurat yang tidak memungkinkan penulisan yang lebih ideal yakni teks faktual. Siasat semacam ini mengingatkan kita pada siasat para intelektual Indonesia di masa kini. Karena depolitisasi yang mencekam, mereka *berniat* melakukan perlawanan politisasi dalam wilayah yang sah (yakni a-politis). Mereka mengaku tidak berpolitik tetapi hanya mengadakan aksi/gerakan moral, atau mendirikan organisasi intelektual, nasionalistik, atau primordial. Mereka melakukan perlawanan depolitisasi justru dengan ikut mereproduksikannya untuk berlingung.

Ditilik dari implikasinya, disklaim para pengarang fiksi itu tidak banyak berbeda dari apa yang dinyatakan pendahulu mereka sebagai sebuah klaim:

*Soeatoe tjerita jang betoel telah
terdjadi di Djawa Tenga pada
waktoe jang belon
Sabrapa lama⁴*

Walau bunyinya berbalikan, disklaim dan klaim para pengarang ini menegaskan sebuah keyakinan akan adanya dikotomi fakta/fiksi. Dan ini tentunya dapat dinyatakan dengan cara lain. Umpamanya ada seorang pejabat-negara, seorang wartawan, atau peneliti memulai sebuah laporan hasil kerjanya dengan pernyataan: "ini bukan fiksi".

Semua pengamatan di atas tidak sekedar menjelaskan apa pesan di balik pernyataan-pernyataan itu. Semua itu juga memberikan petunjuk masyarakat macam apa yang melahirkan pernyataan-pernyataan demikian. Untuk gampangnya, corak masyarakat itu dapat digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang tidak memisah-misahkan fakta/fiksi secara rapi dan tegas. Inilah corak masyarakat yang belakangan dikatakan menjadi salah satu ciri kondisi postmodernitas. Bedanya, dalam masyarakat posmodern, campur aduk fakta/fiksi itu diterima dengan gembira, bahkan dicari-cari, dibuat-buat, dan dirayakan. Dalam modernitas, campur aduk itu menggelisahkan, mencemaskan, mengerikan. Maka berbagai klaim dan disklaim itu ditekan-tekan sebagai upaya untuk melayani pencampur-adukan itu dan mempertahankan pemisahan fakta/fiksi.

Dalam konteks demikian, Remy Sylado termasuk salah seorang sastrawan Orde Baru yang paling awal mendobrak dikotomi sastra/non sastra. Sedangkan Rendra termasuk yang paling awal mempermainkan ketakutan orang lain pada campur-aduk fakta/fiksi dalam dramanya berjudul *Kisah Perjuangan Suku Naga* (1975). Di awal kisah teatrikal itu, tampil tokoh Dalang yang menyapa penonton. Dengan demikian melenyapkan ilusi realisme di pentas, dan jarak fiktif antara apa yang terjadi di panggung dan penonton. Seperti para sastrawan sezaman, sang Dalang dalam *Kisah Perjuangan Suku Naga* menegaskan bahwa kisah yang akan disajikan "tidak terjadi di Indonesia". Berbeda dari para sastrawan yang kita bicarakan tadi, Dalang ini menambahkan bahwa ia mohon maaf apabila dalam cerita itu ada hal-hal yang "disengaja atau seakan-akan tidak disengaja" mirip dengan kejadian di Indonesia.

Apa yang dinyatakan Dalang sebagai prakata dalam karya Rendra di atas dipraktekkan secara literer dalam penulisan sekujur teks sastra oleh sastrawan yang paling radikal di masa Orde Baru, yakni Putu Wijaya. Tanpa basa-basi, ia mencampur aduk fakta/fiksi, sastrawan/karya sastra dalam cerita pendek berjudul "Telor". Beginiilah cerita itu berawal:

*Seorang jendral meninggal.... Tetapi sayang, ia
hanya meninggalkan sebutir telor kepada*

*keempat putranya sebagai warisan.
Telor itu menimbulkan pertanyaan besar.
Bagaimana membagi sebutir telor untuk empat
putra yang cinta dan pengabdiannya sama...
Tajuk Rencana harian Kompas menanggapi
bahwa warisan telor itu bermakna simbolik.....*

Kemudian dikutip secara panjang lebar isi tajuk rencana dalam harian itu. Cerita berlanjut begini:

*Goenawan Mohamad menulis catatan pinggir di
dalam majalah Tempo tentang telor. Ia mengajak
pembaca untuk mengartikan telor sebagai telor.
Tak lebih dari sebutir telor. Dan itu adalah
sebuah pemberontakan budaya yang amat
keras.... Profesor Sutan Takdir Alisjahbana
mencoba ikut memecahkan persoalan itu dengan
rasio, dengan mengemukakan teori yang praktis.
"Manusia Timur memang aneh. Soal gampang
dibikin sulit.... Kita harus berpikir rasional,
realistik, praktis, konkret dan efisien," katanya
dengan keras.....
Penyair WS Rendra menulis sajak tentang telor...
Rendra membacakan sajaknya di Taman Ismail
Marzuki dengan pengunjung berjubel. Ia tampil
karismatik dan memikat didampingi oleh bintang
film Christine Hakim. Peristiwa kesenian yang
berharga hampir seratus juta itu menjadi
berita.... Banyak yang seperti terkesima. Lalu
mulai mempersoalkan, mengapa berita sebuah
telor sudah sempat mengalihkan berita yang
lebih menyangkut kepentingan orang banyak?....*

Semua ini belum cukup menjelaskan paradoks yang saya kemukakan di awal tulisan ini. Di satu pihak kita menyaksikan marginalitas kesusasteraan dalam masyarakat yang dikuasai, atau seakan-akan dikuasai dinamika ekonomi, politik, dan teknologi. Di pihak lain masyarakat kita merupakan sebuah samudera fiksi, di mana fakta/fiksi diaduk-aduk habis-habisan. Untuk memahami paradoks ini kita perlu menengok sejenak gambaran yang lebih makro.

Dari Sains ke Sastra

Selama lebih dari satu abad, dan terlebih-lebih lagi selama paruh pertama abad 20 ini, peradaban global dan kajian para sarjana dikuasai oleh kerangka pemikiran 'ilmiah' yang berilham dari ilmu-ilmu sains (alamiah) dan matematika. Kerangka pemikiran yang dominan itu telah beberapa kali diungkapkan dengan julukan-julukan seperti empirisme, strukturalisme, behaviourisme, historisme, dan seterusnya. Semuanya mengunggulkan kerincian, pembuktian, objektivitas, data empirik, pengukuran kuantitatif.

Dominasi kerangka berpikir demikian juga melanda kajian-kajian sosial dan kemanusiaan, termasuk kajian bahasa dan sastra. Para senior kita di bidang kajian bahasa dan sastra tentunya masih ingat suasana waktu itu; bagaimana rumus-rumus ilmiah, dengan gambar

grafik, diagram, garis dan anak panah, bahkan tabel dan statistik, sering digunakan dalam forum diskusi untuk memaparkan sebuah kajian bahasa atau sastra. Sekarang kita boleh mentertawakan masa lampau itu. Namun pada zamannya hal itu sulit dihindarkan karena kerangka ilmiah ala sains pada waktu itu menjadi sumber utama, bahkan sumber tunggal, legitimasi kegiatan intelektual yang dinilai serius dan mendekati kebenaran tertinggi.

Kajian-kajian yang disebut sosiologi sastra, sejarah sastra, atau politik sastra merupakan petunjuk bagaimana 'sastra' baru dianggap serius bila disentuh sebagai objek kajian oleh para sarjana dari bidang-bidang lain. Hal ini dilakukan bukan semata-mata karena para sarjana itu hanya ingin memanfaatkan karya-karya sastra sebagai data pendukung untuk kepentingan penelitian disiplin ilmu non-sastra mereka. Tak kurang-kurangnya para sarjana kesusasteraan yang melakukan studi yang sama justru karena kecintaan pada kesusasteraan. Dan mereka dihargai oleh lingkungan pecinta sastra karena jasanya mengangkat derajat kesusasteraan dari lembah pariah ke tingkat yang lebih terhormat, 'lebih ilmiah'. Dalam konteks semacam itu kita menghargai sumbangan Kuntowijoyo dalam sosiologi sastra dari Sapardi Djoko Damono dan Jakob Sumardjo, serta religiusitas sastra dari YB Mangunwijaya.

Bagaimana kini? Walau tidak sepenuhnya terjadi penjurungkirbalikan, teori-teori sastra telah menempati kedudukan yang sangat menonjol dalam perkembangan intelektual dalam beberapa dekade belakangan ini. Tampaknya hal itu masih akan berlanjut terus untuk beberapa tahun mendatang. Menonjolnya berbagai kajian intelektual yang mirip kritik sastra berlangsung di berbagai bidang disiplin ilmu, jauh melampaui batas-batas formal ilmu sastra. Untuk menyebut beberapa contoh saja, kecenderungan itu dapat diamati dalam kajian sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu politik, etika, dan filsafat.

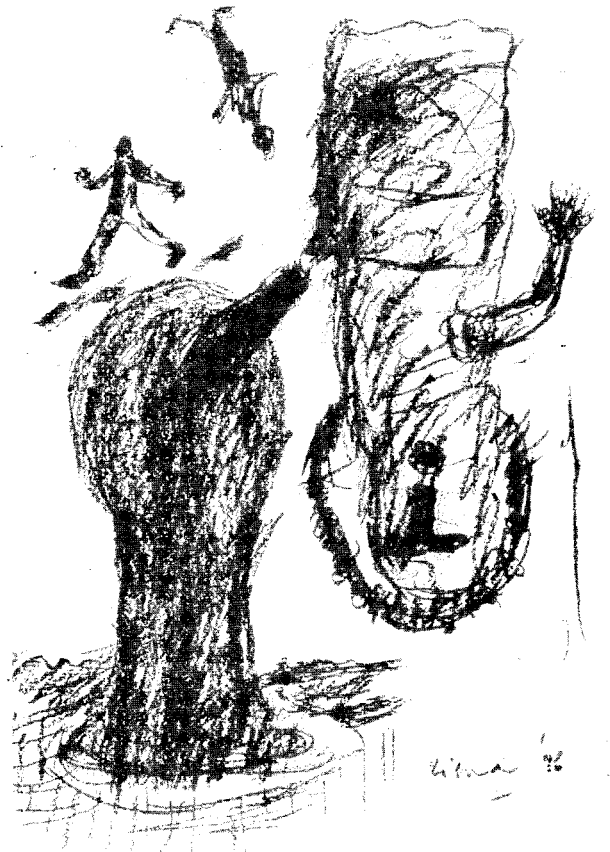
Berbeda dari sosiologi sastra, sejarah sastra, atau psikologi sastra, yang terjadi belakangan ini bukannya peng-ilmiah-an wacana kesusasteraan, tetapi justru sastra-nisasi wacana keilmuan dan intelektual secara makro. Berbeda pula dari contoh-contoh yang saya sajikan di bagian paling awal tulisan makalah ini, fiksionalitas yang menjadi faktor utama kesusasteraan tidaklah dinilai identik dengan catat atau nista. Gejala sastra-nisasi ilmu-ilmu sosial-budaya ini dapat dijumpai di berbagai negara, termasuk di Indonesia, walau dengan tempo, skala dan intensitas yang berbeda-beda.

Paling sedikit dalam 20 tahun belakangan ini, *wawasan sastra* (mohon ini dibedakan dari 'kesusasteraan' sebagai sebuah lingkungan/disiplin ilmu/pranata sosial) menempati posisi sentral/dominan atau nyaris demikian dalam perkembangan intelektual mutakhir. Inilah yang saya maksudkan sebagai 'sastra-nisasi' dunia intelektual mutakhir. Ironisnya, apa yang secara formal disebut sebagai disiplin ilmu sastra,

dan para kritikus sastra, di Indonesia tidak banyak ambil bagian dalam 'boom' kajian sastra/budaya ini. Proses sastra-nisasi intelektual itu banyak dikerjakan oleh mereka yang secara formal berasal dari bidang non-sastra! Pengamatan awam ini mungkin tidak sepenuhnya tepat. Peran pusat-pusat kajian yang secara formal disebut 'sastra' di Indonesia dalam proses sastra-nisasi intelektual mutakhir tidak cukup kelihatan di mata awam kecuali jika peran itu besar dan menonjol.

GEERTZ dan ANDERSON

Demi jelasnya uraian dan demi adilnya bagi yang dibanding-bandingkan, izinkan saya menyebutkan beberapa acuan yang lebih konkret untuk menggambarkan contoh-contoh klasik gejala sastra-nisasi intelektual mutakhir. Dalam seluruh sejarah intelektual Indonesia dan kajian ilmiah internasional tentang Indonesia, ada dua sarjana yang mencapai prestasi puncak sebagai akademikus. Yang pertama adalah Clifford Geertz, yang kedua Benedict Anderson. Melebihi prestasi dan ketenaran para sarjana Indonesia dan sarjana asing tentang Indonesia yang lain. Karya-karya kedua tokoh ini telah menjadi bacaan wajib atau klasik bagi berbagai sarjana di dunia yang berkecimpung di berbagai disiplin akademik di lingkungan kajian sosial dan kemanusiaan. Berbagai universitas mewajibkan mahasiswa di bidang sosial budaya membaca karya-karya kedua tokoh itu sejak tahun-tahun pertama mereka berkuliah.



Karya-karya monumental mereka sedikit banyak merupakan buah dari pemahaman yang sangat mendalam tentang seluk-beluk sastra. Mereka banyak mengambil ilham dari kerja kritikus sastra, dan mereka mengutip karya-karya sastra untuk menjelaskan argumentasinya tentang gejala sosial di luar teks sastra. Kepekaan sastra dan ketajaman analisis tekstual mereka tidak kalah dari pada rata-rata kritikus sastra. Ironisnya, kecemerlangan analisis tokoh-tokoh ini dihargai terutama di kalangan ilmu-ilmu sosial. Prestasi mereka jarang dipertimbangkan, bahkan mungkin tidak banyak dikenal di kalangan peneliti sastra sendiri.

Salah satu karya terpenting Geertz adalah *The Interpretation of Cultures* (1973). Pada bab pertama buku itu, Geertz memaparkan wawasan teorinya. Salah satu pernyataannya yang langsung berkait dengan kita di sini berbunyi: karya-karya antropologi tentang masyarakat adalah fiksi, "dalam pengertian sesuatu yang dibuat-buat, direka-reka... bukan sesuatu yang palsu, tidak nyata, atau mengada-ada" (1973:15)⁵. Sebelumnya dia juga menulis bahwa mengerjakan penelitian etnografis ibarat "membaca (dalam pengertian 'membangun bacaan tentang') sebuah naskah" (1973:10). Dari judul bukunya sudah terungkap bagaimana sikap Geertz terhadap masyarakat dan gejala sosial yang ditelitinya mirip dengan sikap seorang kritikus menghadapi teks sastra.

Karya Benedict Anderson yang telah menjadi bacaan klasik di seantero dunia tentu saja *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983). Dari Geertz kita masih mendapat kesan adanya dua dunia/realitas yang terpisah: masyarakat yang diteliti antropolog (fakta) dan karya para antropolog tentang masyarakat itu (fiksi). Pada Anderson, apa yang ada dalam dunia modern disebut 'nasion' adalah sebuah karya budaya (1983:13), sesuatu yang hanya hadir di imajinasi, walau bukan berarti imajiner belaka. Oleh karena itu untuk dapat memahami seluk-beluk dan asal-usul munculnya bangsa-bangsa di dunia sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan, menurut argumentasi yang kuat dari Anderson, kita harus memahami gerak-gerik dan daya imajinasi umat manusia yang terlibat. Yang disebut belakangan ini ternyata mengalami perubahan besar-besaran sejak abad 18. Dan untuk memahaminya, masih menurut Anderson, kita harus menyimak perubahan-perubahan dalam sejumlah gejala: otoritas keagamaan di Eropa, pertumbuhan kapitalisme bahan cetakan, perubahan penghayatan dan konsepsi waktu, serta tumbuhnya novel dan surat kabar yang paling awal.

Untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan yang tak perlu, sebaiknya ditegaskan di sini bahwa baik Geertz maupun Anderson tidak bermaksud menggantikan antropologi dan/atau ilmu politik menjadi kritik sastra. Mereka tetap bekerja dalam bidang disiplin mereka, tetapi dengan mengandalkan alat analisa yang ke-sastra-an. Istilah 'sastranisasi' yang sejak tadi saya

pakai bukanlah agenda atau tujuan akhir kerja mereka. Mereka sama sekali tidak menggunakan istilah 'sastranisasi' itu. Sayalah yang menggunakan istilah itu untuk keperluan bahasan ini. Perlu juga diakui, bahwa fiksi dan sastra bukanlah sinonim. Fiksionalitas hanyalah sebagian, walau mungkin yang utama, dari kualitas kesusasteraan, tetapi bukan satu-satunya. Dalam proses sastra-nisasi yang saya gambarkan, perbedaan sastra dan fiksi itu sengaja tidak saya rinci. Hal itu hanya akan memperumit masalah yang menjadi pusat perhatian bahasan tulisan ini.

Dengan menyebutkan dua sarjana dan satu judul karya masing-masing itu, bukan maksud saya mengunggulkan keduanya sebagai karya teladan. Kedua sarjana itu dan karya-karya mereka tak luput dari berbagai kritik dan sanggahan. Tetapi dengan kritik sebanyak itu dan sehebat apa pun, sulit membantah keistimewaan keduanya. Bahkan kritik-kritik itu mungkin tidak diajukan orang dengan bertubi-tubi bila pengaruh karya kedua sarjana itu tidak sedemikian hebatnya. Yang kita persoalkan adalah lingkup pengaruh mereka pada lingkungan intelektual sebagai sebuah gejala sosial, bukan nilai internal karya-karya itu sendiri.

Juga harus diakui Geertz dan Anderson bukan sarjana ilmu sosial yang pertama atau terakhir yang mempraktekkan sastranisasi ilmu-ilmu sosial. Keduanya saya sebutkan di sini karena mereka akrab di kalangan sarjana Indonesia. Keduanya pernah meneliti masyarakat Indonesia secara khusus. Walau tidak terlalu bercorak sastra, karya bersama Peter Berger dan Thomas Luckman yang berjudul *The Social Construction of Reality* (1984) pantas disebutkan di sini, untuk menyebutkan satu contoh tenar lain dari kalangan ilmu sosial di zaman yang sama yang menolak keangungan paradigma lama tentang kebenaran objektif. Mereka menekankan pentingnya unsur imajinasi kreatif. Kecenderungan serupa atau yang mirip telah merebak dalam berbagai versi, corak dan arah beberapa tahun belakangan ini. Mereka telah kita kenal dengan bendera bermacam-macam: analisa wacana, konstruktionisme, dekonstruksiois, postmodernisme, poststrukturalisme, kajian budaya, dan sebagainya.

Di lingkungan pecinta sastra di Indonesia, gelombang intelektualisme ini sudah memberikan angin baru yang segar. Selain beberapa nama besar seperti Melani Budianta, Nirwan Dewanto, atau Faruk HT, ada sejumlah pecinta sastra kita yang telah mengadakan dialog kritis dan kreatif dengan perubahan intelektual/estetika ini. Namun tetap harus diakui bahwa kebanyakan dari kita yang berkecimpung dalam lingkungan sastra lebih banyak 'terkena dampak' atau 'menimba ilham' dari vitalitas intelektual di lingkungan non-sastra ketimbang yang sebaliknya (mengadakan 'intervensi' atau memimpin sastranisasi wacana ilmu-ilmu sosial yang sudah terlanjur didominasi angka-angka statistik). Intervensi atau 'sastranisasi'

itulah yang dengan jelas disumbangkan orang semacam Geertz dan Anderson.

Paradoks Marjinalitas Sastra

Ketika memanfaatkan teori sastra ataupun karya-karya sastra, baik Geertz maupun Anderson tidak membahas satu atau dua karya sastra sebagai kasus individual. Mereka juga tidak membaca karya-karya itu semata-mata sebagai rangkaian adegan sosial yang secara langsung memaparkan 'data sosiologis' untuk dipakai membuktikan sebuah argumentasi ilmiah. Dalam membahas asal-usul nasionalisme, Anderson membahas asal-usul timbulnya novel sebagai sebuah *genre* penulisan naratif: mengapa novel bisa/baru muncul di abad 19, mengapa hampir bersamaan dengan timbulnya nasionalisme. Dengan Anderson, kita dapat menyadari kaitan yang sangat mendasar di antara lahirnya sebuah *genre* yang dinamakan novel dan lahirnya komunitas yang dinamakan nasion. Itu sebabnya banyak novel menggumuli proses awal pertumbuhan nasionalisme di wilayah jajahan seperti Hindia Belanda. Sebaliknya, kaum nasionalis banyak yang menggumuli novel sebagai sebuah *genre* penulisan fiksi. Nasionalisme bukan sekedar sebuah pilihan 'topik/thema' bagi novelis. Bukan sekedar karena berwawasan budaya yang luas, atau karena hobby, bila nasionalis gandrung membaca/menulis novel.

Dengan semangat makro seperti itu pula saya berminat mempertanyakan kembali posisi kesusasteraan dalam pertumbuhan masyarakat mutakhir. Saya tidak mempersoalkan individu karya sastra tertentu, atau sekedar penjumlahan keseluruhannya. Saya juga tidak mempersoalkan satu atau lebih rumpun khasanah karya sastra yang tersisihkan (sastra pedalaman, seni untuk seni, sastra terasing, sastra alternatif, sastra pinggir), walau hal itu pantas dikaji di kesempatan lain.

Benarkah sastra Indonesia terasing dari masyarakatnya atau mengalami marjinalisasi? Ini merupakan pertanyaan kuno yang sudah berkali-kali diperdebatkan orang. Saya akan berusaha untuk tidak mengulang jawaban lama yang meletihkan banyak pihak. Untuk itu ada baiknya kita menghindarkan salah satu segi yang kurang menguntungkan bila benar terjadi keasingan sastra (masyarakat terbius materialisme sehingga kurang menghargai nilai estetika, kritikus arogan, sastrawan sibuk dengan diri sendiri, penerbit yang kurang wawasan, pendidikan sastra yang gagal, pemerintah kurang mendukung, dsb.) Kita periksa saja apakah dalam kenyataan sosiologis dapat diamati terjadinya marjinalisasi sastra apa artinya, apa manifestasinya.

Uraian di awal tulisan ini menggambarkan sebuah paradoks. Mungkin karena inilah pertanyaan tentang keterasingan/marjinalitas sastra tidak pernah akan memberikan satu jawaban berdimensi tunggal yang gamblang. Di satu pihak, sastranisasi menandakan

kejayaan *wawasan sastra* juga sejumlah teori sastra di berbagai kawasan intelektual. Pelajaran terpenting yang kita peroleh dari para sarjana seperti Geertz dan Anderson adalah ini: jika anda ingin meneliti apa pun tentang gejala sosial dan budaya, belajarlah teori sebaik-baiknya. Berbagai peristiwa dalam masyarakat dapat, bahkan perlu, dibaca dan ditafsirkan sebagaimana kritikus sastra membaca teks-teks karya sastra. Ini cocok dengan pengamatan orang semacam Abdurahman Wahid.

Bukan hanya demokrasi kita mirip sebuah karya rekaan, tetapi juga apa yang dinamakan kasus internal PDI, kampanye Pemilu, sidang pengadilan, sidang parlemen, apa yang disampaikan kaum marjinalis sebagai laporan 'berita', sampai berbagai gosip yang seram seperti skandal seks, lenyapnya Eddy Tanzil, atau bangkitnya komunisme dari liang kubur. Maka yang perlu belajar sastra bukan hanya mahasiswa kesusasteraan, tetapi juga para mahasiswa sosiologi, ilmu politik, psikologi, hukum, sejarah, antropologi, jurnalisme, dan sebagainya. Teori-teori sastra seharusnya menjadi bacaan wajib, bukannya statistika, bagi para mahasiswa ini. Kritik sastra perlu dipertimbangkan menjadi salah satu latihan yang penting dalam silabus mata kuliah metodologi penelitian sosial, politik, hukum, atau sejarah. Dengan demikian minimal dalam sepuluh tahun terakhir, sulit untuk menerima keluhan kuno tentang nasib sastra yang terlantar. Malahan di beberapa tempat terdengar keluhan serius tentang terpukainya para sarjana sosial tenar di sepanjang abad ini oleh teori-teori dan kajian sastra (Anderson, 1976, Merquior, 1985).

Namun di pihak lain, di Indonesia saat ini, perkembangan sastranisasi tersebut tidak banyak melibatkan para sarjana/kritikus/penulis sastra dan tidak banyak berlangsung di lingkungan yang secara resmi disebut 'kesusasteraan'. Kalau tadi dikatakan bahwa para mahasiswa ilmu-ilmu sosial seharusnya belajar tentang teori dan kritik sastra, biasanya himbauan itu tidak disertai dengan keterangan bahwa pelajaran tentang itu dapat timba langsung dari lingkungan ilmu sastra yang selama ini berkembang di Indonesia. Dengan beberapa pengecualian, tampaknya arus besar dalam studi sastra di Indonesia masih terus menderita penjajahan paradigma ilmu-ilmu alamiah.

Maka pernyataan tentang sastra yang terasing bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Terlalu gamblang sehingga mubazir bila diuraikan panjang-lebar bahwa di dalam potret makro dinamika sosial Indonesia saat ini, wajah kesusasteraan hampir-hampir tidak kelihatan. Dalam konteks seperti ini, istilah 'marjinalitas' sastra padat ambiguitas, jika bukan kontradiksi internal.

Membicarakan 'sastra marjinal' mengisyaratkan adanya 'sastra sentral' di seberang lain. Tanpa ada yang satu, penamaan untuk yang lain jadi kandas makna. Memang dalam kebanyakan kasus ada hierarki dan diskriminasi sastra. Ada serumpun khasanah sastra diunggulkan (sentral), yang lain disisihkan ke pinggir

(marjinal). Ada karya-karya sastra yang diresmikan sebagai 'kesusasteraan nasional', ada yang dilarang beredar, ada yang diremehkan sebagai bacaan pop/hiburan. Hal ini juga terjadi di Indonesia.

Namun secara makro, seluruh pranata kesusasteraan kita —termasuk sastra yang sentral— berada di pinggiran dinamika sosial yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami perubahan dramatis. Dengan kata lain semua sastra sebenarnya berada pada posisi marjinal. Satu-satunya alasan untuk menganggap ada yang sentral adalah dalam hierarkinya dengan beberapa gelintir sastra lain yang senasib.

Peran sentral masyarakat kita kini dikuasai oleh industri kapitalisme. Ini sendiri merupakan gejala yang relatif baru. Hingga sepuluh tahun yang lalu, kedudukan sentral dalam dinamika masyarakat itu ditempati oleh kepemimpinan militer, birokrasi negara dan proyek pembangunan yang dijaga ketat oleh kebijakan 'stabilitas & keamanan'. Satu-satunya kekuatan yang secara potensial mandiri di luar sentra itu adalah moralitas, gerakan intelektual dan ibadah keagamaan Islam. Baru dalam dekade terakhir kita menyaksikan tumbuhnya kekuatan lain yang berusaha memasuki wilayah sentral itu: gerakan sosial kelas menengah (hak asasi, perempuan, lingkungan hidup, hak konsumen, demokratisasi global) dan gerakan kaum buruh. Keduanya anak kandung keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru.

Sastra tidak sepenuhnya terpentak dari sepaik terjang berbagai unsur di atas. Terjadi interaksi timbal balik. Karya-karya sastra dan penulisan kritik serta analisa sosiologi sastra mencermati perkembangan sosial itu. Kajian sosiologis sastra diperkaya oleh berbagai peristiwa-peristiwa dan wacana sosiologis mutakhir. Dalam perkemahan seni di Solo sewaktu Indonesia merayakan hari ulang tahun emas proklamasi kemerdekaan, ratusan penyair membacakan puisi-puisi 'marah' terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan. Sebaliknya, kaum non-sastrawan dan non-kritikus sastra mulai lincah mengutip-kutip karya sastra. Bukan hanya para demonstran anti-kemapanan yang suka membaca puisi di panggung terbuka. Kini telah bertumbuh gaya hidup baru di lingkungan birokrat negara dan elit business: membaca puisi di depan umum.

Biar pun ada interaksi seperti ini, haruslah diakui interaksi itu tidak terjadi secara setara di antara pihak-pihak yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Pranata resmi kesusasteraan terdesak oleh berbagai masalah lain yang lebih banyak menyedot perhatian dan energi masyarakat (baik secara finansial, intelektual, maupun estetika). Dapatkah Anda ingat, kapan terakhir kali Anda melihat masalah tekstual kesusasteraan (bukan kasus pejabat membaca puisi atau kontroversi anugerah Yayasan Magsaysay) sebagai berita utama di salah satu harian besar di negeri ini? Kapan kita mendengar sebuah perdebatan di luar profesi studi kesusasteraan, seperti halnya komputer

dibahas meluas bukan oleh ahli komputer, kredit bank dibahas mereka yang bukan ahli perbankan, atau agama dibahas bukan oleh pimpinan agama dan sarjana teologi?

Fiksi: sebuah Keniscayaan

Perbedaan dan pertentangan antara realitas 'faktual' dan realitas 'fiktif' merupakan sebuah karya fiksi terbesar dalam peradaban manusia modern selama 200 tahun terakhir. Kehebatan karya fiksi ini terwujud pada kemampuannya mengelabui penciptanya sendiri: manusia modern. Fiksi ini menampilkan diri seakan-akan sebagai sebuah realitas faktual atau natural yang objektif. Seperti halnya pernyataan 'matahari terbit di ufuk Timur' seakan-akan merupakan gambaran faktual tentang kejadian alam yang tidak direka-reka manusia.

Kesusasteraan modern dilahirkan dan dibesarkan oleh dikotomi fakta/fiksi itu. Kelangsungan hidup kesusasteraan telah digantungkan pada reproduksi dikotomi yang sama. Dengan dikotomi itu pula, kesusasteraan telah dilecehkan sebagai bagian yang murahan, rekaan, dan embel-embel bagi realitas sejati. Kesusasteraan hadir sebagai lawan dan sekaligus mitra karya tekstual yang dijuluki faktual atau non fiksi. Sebagai lawan, ia seringkali melakukan perlawanan, ejekan, kritik dan koreksi terhadap banjir propaganda dan analisa ilmiah yang dominan dalam masyarakat industrial padat-ilmu dan padat-modal. Sebagai mitra, ia membantu mempropagandakan tahyul masyarakat modern akan adanya realitas lain (non-fiktif) di luar karya-karya yang disebut sastra.

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang ditakdirkan hidup dalam cengkeraman karya-karya fiktif yang dibikinya sendiri. Manusia merupakan makhluk yang berbahasa, dan bahasa tidak pernah tidak bersifat fiktif atau kiasan tentang realitas dunia yang seakan-akan faktual. Mirip dengan bintik-bintik cahaya yang disorotkan ke layar bioskop, layar monitor dan televisi. Perbedaan bahasa-kiasan dan bahasa harafiah merupakan sebuah fiksi lain yang telah mencengkeram cakrawala kesadaran modern. Maka selama manusia masih berbahasa, selama itu pun kesusasteraan menempati kedudukan sentral (secara diam-diam atau terbuka). Tentu saja hal ini tidak hanya terwujud dalam bentuk yang berlaku di suatu periode: novel, cerpen, sajak.

Sejarah modern merupakan sejarah yang panjang dan rumit tentang berbagai fiksi yang *tidak* diproklamasikan sebagai fiksi atau sastra. Yang belakangan tampil cukup menonjol selama paruh kedua abad ini dan kini mulai layu adalah karya fiksi yang dinamakan "Pembangunan". Yang kemudian tampil menggiurkan adalah "Globalisasi" dan "Demokratisasi". Di Asia saat ini sedang dipasarkan sebuah fiksi berbunyi 'Jatidiri Timur' dan "Asian Values", sebagai kiasan tandingan untuk kiasan 'Demokrasi'. Di Asia Tenggara dipasarkan kiasan 'keterlibatan konstruktif'

(constructive engagement) untuk menggambarkan upaya berdagang di negeri Burma di atas penderitaan rakyat yang tertindas rezim militer.

Jelas istilah seperti 'Pembangunan' merupakan sebuah kiasan. Berbagai angan-angan, janji-janji, dan laporan kerja dengan lampiran angka-angka statistik yang diberi label Pembangunan dapat dan seharusnya dibaca sebagai sebuah teks fiksi. Namun para sarjana kesusasteraan tidak melakukan ini, apa pun sebabnya. Dengan demikian mereka ikut bertanggung jawab atas merajalelanya kegagalan masyarakat luas untuk memahami watak fiksionalitas Pembangunan.

Apa yang kita kerjakan sejak merebaknya program nasional (bahkan global) Pembangunan? Banyak yang melakukan kajian kesusasteraan dengan thema "Dalam rangka menunjang Pembangunan". Atau kita membahas dan meratapi marjinalitas sastra di era Pembangunan yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan ekspor non-migas. Yang lain mempelajari dengan canggih citra-citra pembangunan yang terungkap dalam karya-karya fiksi mutakhir.

Semua kegiatan ini punya nilai yang tak perlu dilecehkan atau diabaikan. Namun semua itu seringkali berlangsung tanpa diikuti refleksi kritis dan teoritis tentang dampaknya. Tanpa disadari, kegiatan intelektual semacam itu mereproduksi terus fiksi tentang dikotomi fakta/fiksi. Selama dikotomi fakta/fiksi ini tidak dibongkar dan di-dekonstruksi, kita akan senantiasa mendengar ratapan tentang marjinalitas kesusasteraan. Seakan-akan marjinalitas sastra merupakan sebuah realitas objektif yang terlepas dari kreativitas fiktif kita tentang realitas itu sendiri.

Catatan:

1. Tulisan ini disampaikan dalam diskusi pada forum diskusi dalam Pertemuan Ilmiah Nasional VII, Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI), 2-4 September 1996, Parung, Jawa Barat.
2. Tentang hal ini pernah saya uraikan dalam sebuah naskah berjudul "Seakan-akan Pemilu" sebagai sebuah bab dalam kumpulan buku tentang Pemilu yang rencananya akan dipublikasikan ELSHAM, tahun 1995.
3. Saya kutip salah satu halaman awal novel tenar *Senja di Jakarta*, karya Mochtar Lubis (1992).
4. Saya kutip dari halaman judul buku berjudul *Peroesoehan di Koedoes*, karya Tan Boen Kim (1920).
5. Karena ini merupakan terjemahan bebas saya (fiksi buatan saya), maka sebaiknya saya juga menyertakan teks aslinya dalam bahasa Inggris: "anthropological writings are...fictions; fictions, in the sense that they are 'something made', 'something fashioned'...not that they are false, unfactual, or merely 'as if' thought experiments."

PUSTAKA ACUAN

- Anderson, Benedict, 1983 *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Anderson, Perry, 1976 *The Social Construction of Reality*, Reading: Pelican Books
- FORUM Keadilan 1994 "Panggung Peradilan Twenty One", 3 (1), 28/04, hal 110-111.
- Geertz, Clifford, 1973 *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books
- JAKARTA-JAKARTA, 1993 Soetopo Yoewono" wawancara, 361, hal 33.
- Lubis, Mochtar, 1992 *Senja di Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Merquior, J.G. 1985 *Foucault*, London: Fontana Press
- Rendra, 1975 *Kisah Perjuangan Suku Naga*, naskah sandiwaranya tidak diterbitkan
- Susanto, Budi, 1993 *Peristiwa Yogyakarta 1992; Siasat Politik Massa Rakyat Kota, Yogyakarta*: Kanisius dan Lembaga Realino.
- Tan Boen Kim, 1920 *Peroesoehan di Koedoes*, Batavia: Drukkerij Goan Hong & Co.
- TEMPO, 1991 "Demokrasi yang Seolah-olah", 18 Mei, hal 22.
- Wijaya, Putu, 19 "Telor" Kompas.

(Ariel Heryanto, budayawan, pengajar, kini mukim di Singapura dan bekerja pada *Southeast Asian Studies Programme, National University of Singapore*).

